

SCRIPTA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA

Vol. 5 No. 2, Desember 2023, Hal.18-35

<https://doi.org/10.33019/scripta.v4i2.138>

ISSN: 2656-9809 (Online)

<http://scripta.fisip.ubb.ac.id/index.php/scripta/index>

POLITIK TATA KELOLA APBDES BERBASIS KEPULAUAN : STUDI TERHADAP ALOKASI ANGGARAN DI LEPAR PONGOK

Adilla Husnul Khotimah¹

Universita Bangka Belitung

Email: adillahusnulkhotimah@mahasiswa.ubb.ac.id

Bahjatul Murtasidin²

Universita Bangka Belitung

Email: Bmurtasidin@gmail.com

Ranto³

Universita Bangka Belitung

Email: rantopalempat@gmail.com

Abstrak

Wilayah pesisir atau kepulauan merupakan sebuah wilayah perbatasan antara darat dan laut. Salah satu daerah kepulauan di Bangka Belitung adalah Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan. Bangka Selatan menjadi kabupaten terluas yang ada di Bangka Belitung. Lepar Pongok merupakan kawasan yang memiliki sumber daya dan ekosistem laut yang produktif. Sehingga, anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah pun memiliki keistimewaan. Corak dari anggaran bagi kawasan kepulauan memiliki ciri tersendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dimiliki oleh daerah kepulauan. Anggaran yang dimiliki oleh setiap desa pun berbeda. Tetapi dalam melakukan tata kelola anggaran (APBDes) masih terdapat beberapa kendala seperti terlambatnya dalam mengumpulkan SPJ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dari tata kelola serta alokasi anggaran APBDes dan corak APBDES berbasis kepulauan yang dilakukan oleh Kecamatan Lepar Pongok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang berfokus pada pengelolaan APBDES di Kecamatan Lepar Pongok. Penelitian dilakukan dengan wawancara melalui metode *purposive sampling*, yang mewawancarai kepala desa serta pemerintah desa yang ada di Lepar Pongok dan juga dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Bangka Selatan. Tata kelola dan alokasi APBDES di Kecamatan Lepar Pongok sangat beragam. Selain itu memiliki corak tersendiri yang menjadi ciri dalam melakukan tata kelola dan alokasi anggaran sebagai daerah kepulauan.

Kata kunci: Anggaran, APBDes, Desa, Kepulauan

Abstract

Coastal areas or islands are a border area between land and sea. One of the islands in Bangka Belitung is Lepar Pongok Sub-district, South Bangka Regency. South Bangka is the largest district in Bangka Belitung. Lepar Pongok is an area that has productive marine resources and ecosystems. Thus, the budget provided by the local government is also special. The style of the budget for the islands has its own characteristics. This is due to several factors owned by the islands. The budget for each village is different. But in carrying out budget governance (APBDes) there are still some obstacles such as delays in collecting SPJ. This study aims to find out how the process of governance and budget allocation of APBDes and island-based APBDES patterns carried out by Lepar Pongok District. This research uses qualitative research methods with the type of case study research that focuses on APBDES management in Lepar Pongok District. The research was conducted with interviews through a *purposive sampling* method, which interviewed the village heads and village governments in Lepar Pongok and also the community and village empowerment office of South Bangka Regency. The governance and allocation of APBDES in Lepar Pongok sub-district is very diverse. In addition, it has its own style that characterizes the governance and budget allocation as an archipelago.

Keywords: Budget, APBDes, Village, Islands

PENDAHULUAN

Politik anggaran merupakan sebuah perwujudan dari kebijakan, serta komitmen politik dalam memutuskan bagaimana format proses penyelenggaraan pemerintah diliputi oleh kemana uang harus dibelanjakan dan darimana uang itu didapatkan. Anggaran menggambarkan hubungan antar aktor politik yang berkepentingan dalam proses alokasi sumber daya alam. Keterlibatan dari banyak aktor sepanjang penganggaran merupakan unsur utama di dalam politik anggaran. Politik anggaran menjadi ukuran dalam proses alokasi anggaran yang berfokus pada pembangunan bagi kepentingan masyarakat.

Menurut Wildavsky dan Caiden (2004) dalam proses melakukan penganggaran sering terjadi konflik dalam melakukan pemilihan sebuah kebijakan. Hal ini terjadi karena anggaran yang dimiliki terbatas yang membuat harus dibagi secara merata dan proporsional. Agar dalam proses pembagian dana terjadi dengan adil, maka harus memiliki mekanisme untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan. Menurut Wildavsky dan Caiden (2004) tujuan dari penganggaran merupakan refleksi dari tujuan orang-orang yang terlibat didalamnya. Anggaran dibuat untuk mengkoordinir semua kegiatan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Anggaran juga sering digunakan untuk mewujudkan kesenangan sekelompok orang, anggaran dijadikan sebagai sarana untuk melakukan mobilisasi dukungan (Arifin, Shihab, & Fadhillah, 2021).

Kawasan pesisir merupakan sebuah kawasan perpindahan antara darat dan laut. Kawasan pesisir ini dimana aktivitas di daratan maupun di laut saling mempengaruhi satu sama lain. (Ketchum, 1972). Memiliki karakteristik seperti; Pesisir adalah kawasan yang strategis karena mempunyai topografi yang cukup mudah untuk dikembangkan karena menjadi jalan untuk pergerakan. Sumber daya yang dimiliki oleh wilayah pesisir ini bermanfaat dan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Provinsi kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 menerima dana desa sebesar Rp.274.419.601.000,00. Adapun dana tersebut akan disalurkan kepada Kabupaten Bangka sebesar Rp.55.387.935.000,00, Belitung Rp.38.928.207.000,00, Bangka Selatan Rp.44.415.323.000,00, Bangka Tengah Rp.46.977.021.000,00, Bangka Barat Rp.52.346.309.000,00, dan Belitung Timur Rp.36.364.806.000,00 (Imelda, 2022). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu di Indonesia yang berbentuk kepulauan. Provinsi Kep. Babel ini terdiri dari banyak pulau dengan pulau utamanya yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kondisi geografis yang dimiliki oleh Bangka Belitung inilah yang membuat membuatnya menarik. Terdiri dari enam kabupaten dan satu kota. Salah satu kabupaten yang memiliki beberapa pulau kecil dan berpenghuni adalah Kabupaten Bangka Selatan.

Kabupaten Bangka Selatan merupakan Kabupaten terluas yang ada di Bangka Belitung dengan luas 3.607,08 KM. Bangka Selatan memiliki lima puluh desa yang tersebar

di tujuh kecamatan (SekdaBasel). Dua kecamatan lainnya terletak di luar Pulau Bangka tepatnya di terdapat di Pulau Lepar dan Pulau Pongok. Kondisi Bangka Selatan yang memiliki lima puluh desa ini tentu memerlukan anggaran untuk menjalankan kegiatan dan pembangunan di masyarakat. Jumlah anggaran yang dimiliki oleh setiap desa pun berbeda. Hal ini di tentukan oleh beberapa faktor seperti luas wilayah, kondisi kerawanan geografis, jumlah masyarakat dan jumlah masyarakat miskin. Empat faktor ini lah yang menentukan jumlah dana desa yang akan diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap desa. Dalam hal penggunaan anggaran desa tentu berbeda di setiap desanya, tergantung dengan kondisi geografis dan kebutuhan dari masyarakat desa itu sendiri.

Pada saat melakukan tata kelola proses anggaran terjadi berbagai dinamika didalamnya. Di mulai pada saat penyusunan hingga proses pelaporan. Dalam melakukan pengelolaan anggaran tentu desa memiliki peran serta tanggung jawab yang besar. Maka dari itu dalam proses penganggaran desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas, serta transparansi dalam tata pemerintahan. Ini bertujuan agar setiap akhir kegiatan penganggaran desa dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat. Pemerintah desa wajib membuat serta menyusun laporan realisasi kegiatan dan laporan pertanggung jawaban dari APBDes. Laporan ini berisi dari proses pengelolaan anggaran, yang didalamnya terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa.

Tata kelola penggunaan anggaran berbasis kepulauan yang dilakukan oleh Kecamatan Lepar pongok ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Politik Tata Kelola Anggaran Apbdes Berbasis Kepulauan : Studi terhadap Alokasi Anggaran di Kecamatan Lepar Pongok.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada analisis perilaku serta sikap yang tidak dapat dikualifikasikan. Penelitian kualitatif juga berupaya untuk menganalisis fenomena sosial berdasarkan sudut pandang responden (Martono,2015). Menurut Suharsimi Arikunto penelitian dengan studi kasus merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala gejala tertentu.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan adalah Kecamatan

Lepar Pongok merupakan salah satu kecamatan yang berbentuk kepulauan. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari-Juni 2023

Target/Subjek Penelitian

Subyek penelitian atau informan merupakan seseorang yang memberi informasi terkait dirinya, orang lain, atau sebuah kejadian kepada peneliti. Penentuan subyek serta informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan pertimbangan tertentu. Subyek ini merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan anggaran di desa. Informan ini berperan sebagai data primer dalam sebuah penelitian baik sebagai Sumber data informasi terkait dirinya, orang lain, ataupun kejadian. Adapun informan dari penelitian ini adalah : Kepala Desa Penutuk, Kepala Desa Tanjung Sangkar, Kepala Desa Tanjung Labu, Kepala Desa Kumbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka Selatan.

Prosedur

Penelitian ini, membagi jenis dan Sumber data data menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan Sumber data data utama dalam memperoleh informasi penelitian.

Data primer ini didapatkan secara langsung dari objek penelitian untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan. Data primer ini juga menjadi kebutuhan mendasar pada sebuah penelitian. Data dapat di peroleh langsung dari informan di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang atau tambahan dalam sebuah penelitian. Data ini dapat berupa buku, dokumen, biografi atau sebagainya (bustami & Ibrahim, 2009). Data sekunder ini dapat diperoleh dengan melalui membaca, mempelajari dan atau memahami Sumber data-Sumber data yang ada. Data sekunder ini adalah data penunjang atau pendukung dari data primer. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, website, artikel dan data penunjang lainnya.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses pertemuan dua orang atau lebih, saling memberikan informasi atau ide yang dilakukan dengan proses tanya jawab sehingga menghasilkan sebuah topik tertentu (Sugiyono, 2013).

2. Obsevasi

Observasi merupakan proses pengamatan kepada objek yang dilakukan secara mendalam. Observasi dilakukan bertujuan agar pengamat menapatkan data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang ada. Dokumentasi adalah sebuah teknik yang dilakukan dengan cara menyatukan, atau menelaah dokumen dokumen yang berbentuk tulisan, gambar maupun elektronik (Sukmadinata, 2007:221).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi menjadi tiga alur untuk menganalisis suatu data. Tiga tahap dari teknik analisis tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verivication*) (Nasution, 2003).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses dari penentuan, penyederhanaan, atau pemindahan data data kasar yang berasal dari catatan di lapangan. Data-data yang telah terkumpul akan diolah sehingga bertepatan dengan tujuan penelitian. Penyajian

2. Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan untuk memberikan gambaran dari keseluruhan hasil penelitian. Maka dari itu, data yang dikelompokkan oleh peneliti harus memuat informasi yang lengkap terhadap temuan yang ada. Tujuan dari penyajian data ini adalah agar data mudah untuk dibaca dan diolah.

3. Kesimpulan (*Verivication*)

Setelah tahap reduksi dan penyajian data, peneliti melakukan atau mengambil kesimpulan sehingga data yang dihasilkan bermakna. Penarikan kesimpulan

dilakukan dengan menghubungkan pola, model, serta menjawab berbagai permasalahan atau fenomena yang ada pada rumusan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Tata Kelola Anggaran Desa di Kecamatan Lepar Pongok

Proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh desa-desa yang ada di Kecamatan Lepar Pongok ini dilakukan dengan tiga tahapan. Tahapan pertama yaitu perencanaan awal, penyaluran/pelaksanaan alokasi dana desa, dan pelaporan serta pertanggung jawaban. Setiap tahap akan di atur jadwal pelaksanaannya agar proses dari pengelolaan anggaran dapat berjalan lancar.

Proses tata kelola anggaran desa dilakukan melalui beberapa tahapan :

Perencanaan APBDes menurut Herlianto (2017) merupakan sebuah aktivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat desa. Program kegiatan desa harus mengikuti aspirasi, kebutuhan, potensi, maupun masalah yang dihadapi oleh masyarakat di desa. Musrenbangdes dilakukan dengan menentukan prioritas program yang melibatkan masyarakat secara partisipatif dari bawah dan secara menyeluruh. Pada saat melakukan perencanaan perlu disusun rancangan yang berisi sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa.

Menurut Herlianto (2017) tahap **Pelaksanaan** merupakan kegiatan untuk mengendalikan sumber daya manusia maupun keuangan. Fase perencanaan ini bertujuan untuk menerapkan kegiatan yang sudah dirumuskan atau direncanakan secara tepat waktu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan program, yaitu: Pemerintah desa harus bertanggungjawab atas melaksanakan kegiatan; Pemerintah desa yang didukung oleh perangkat desa seperti dusun, RT, RW menghimpun dana (pendapatan) yang ada untuk membiayai pengeluaran; pemerintah desa menyediakan dana yang ada untuk membiayai pelaksanaan kegiatan desa; Kepala desa mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan kepala desa. Masyarakat ikut serta dalam kegiatan tersebut. Proses penyaluran anggaran desa berlangsung dalam beberapa prosedur. Pelaporan merupakan tahapan dimana kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan tengah tahunan dan tahunan kepada gubernur dan juga menyampaikannya kepada BPD.

Ini sesuai dengan pernyataan dari Wildavsky jika menahami anggaran sebagai sebuah catatan dimasa lalu, merencanakan masa depan, digunakan untuk pengalokasian sumber daya, metode untuk pertumbuhan, alat penyalur pendapatan, harapan aspirasi, mekanisme untuk melakukan negosiasi, kekuatan kontrol, strategi organisasi, dan sebagai alat komunikasi.

APBDES yang di terima oleh setiap desa yang ada di Kecamatan Lepar Pongok pada Tahun 2022 adalah lebih dari satu miliar rupiah. Dana ini dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan biaya pemberdayaan masyarakat. APBDES ini berisi terkait pendapatan dan rencana belanja desa selama satu Tahun. Adapun pendapatan yang di peroleh oleh desa menurut APBDES desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain lain. Selain terdapat Sumber data pendapat di dalam APBDES juga terdapat rincian belanja desa yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Pendapatan yang di dapatkan oleh desa terdiri dari dana desa yang bersumber data dari pusat, alokasi dana desa dari kabupaten dan juga dana dari bagi hasil pajak dan retribusi. Anggaran atau dana yang didapatkan oleh setiap desa pun berbeda. Penyebab dari perbedaan pendapatan dari alokasi dana desa setiap desa dapat diukur melalui luas wilayah, indeks kerawanan geografis, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin.

Tahap **Pelaporan Anggaran** yang digunakan oleh pemerintah desa menggunakan aplikasi siskueds untuk membantu meng input data. Akan tetapi, kurangnya pemahaman dari pemerintah desa membuat proses pelaporan terlambat. Laporan realisasi kegiatan yang akan di serahkan kepada bupati melalui camat di Kecamatan Lepar Pongok masih terjadi keterlambatan. Hal ini dikarenakan, perangkat desa yang kurang disiplin dan masih suka mengulur waktu dalam melakukan pekerjaan. sikap kurang disiplin ini juga termasuk dalam melakukan penyusunan SPJ dan pembuatan laporan keuangan lainnya, belum lagi ditambah dengan kurangnya pemahaman serta penguasaan teknologi.

Adapun pengelolaan dana desa di Kecamatan Lepar Pongok:

1. Desa Tanjung Labu

Proses perencanaan yang dilakukan oleh Desa Tanjung Labu dilakukan pada satu tahun sebelum anggaran itu dilaksanakan. Proses perencanaan dilakukan di kantor desa dengan melibatkan berbagai *stakeholder* di desa. Para *stakeholder* tersebut terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh budaya, nelayan, petani, dan berbagai tokoh lainnya. Mereka akan mendiskusikan apa saja yang akan dilakukan dan dikembangkan oleh desa selama satau tahun kedepannya.

Pada saat melakukan pengelolaan anggaran desa, dilakukan oleh pemerintah desa tanjung labu itu sendiri. Struktur unit kerja di Pemerintah Desa Tanjung Labu bertujuan untuk membantu dan mengelola anggaran yang dimiliki oleh desa. Setelah melakukan penyusunan anggaran, pemerintah desa akan mengeluarkan perdes

(peraturan desa) terkait dengan APBDes. Sumber pendapatan yang dimiliki oleh Desa Tanjung Labu terdiri dari dua sumber, yaitu terdiri dari pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Jumlah dari pendapatan yang dimiliki oleh Desa Tanjung Labu adalah sebesar Rp. 1.992.525.433,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah). Rincian anggaran ini terdapat dalam Peraturan Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan No 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Apbdes-P Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian dari pendapatan yang dimiliki oleh Desa Tanjung Labu :

Tabel 1
Rincian pendapatan Desa Tanjung Labu Tahun 2022

Keterangan	Anggaran (Rp)
Pendapatan Transfer	1.956.525.433,00
Dana Desa	799.722.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	109.908.302,00
Alokasi Dana Desa	1.046.895.131,00
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00
Pendapatan Lain-Lain	36.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	36.000.000,00
Jumlah	1.992.525.433,00

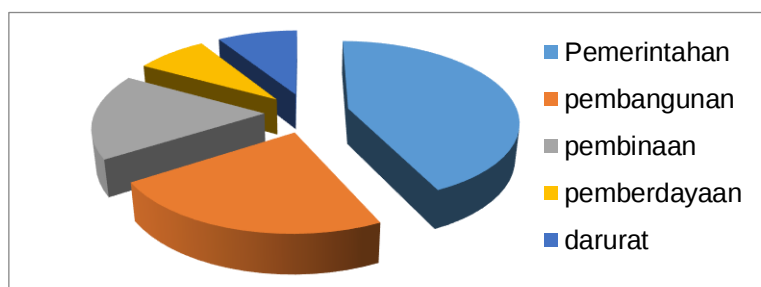
Sumber : Pemerintah Desa Tanjung Labu

Setelah dilakukannya perencanaan serta penyusunan anggaran maka tahap selanjutnya adalah proses pelaksanaan anggaran. Tahap pelaksanaan anggaran dilakukan selama satu tahun Januari-Desember. Penggunaan anggaran desa harus sesuai dengan rancangan awal yang telah ditetapkan. Perubahan anggaran biasanya dapat terjadi satu kali pada pertengahan tahun.

Pada saat penggunaan anggaran harus sesuai dengan rancangan dan penyusunan awal tidak dapat melakukan perubahan yang secara tiba tiba. Perubahan dapat

dilakukan sebanyak satu kali atau tidak berubah sama sekali. Pada tahap perencanaan anggaran desa dibagi menjadi lima bidang, yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. Pembagian anggaran untuk setiap bidang harus sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengatur terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang dimana dengan ketentuan ketentuan: Dalam pelaksanaan anggaran Desa Tanjung Labu dapat dirincikan sebanyak 47% digunakan untuk bidang pemerintahan, 23% untuk bidang pembangunan, 17% untuk bidang pembinaan, 8% untuk bidang pemberdayaan, dan 9% untuk bidang darurat.

Bagan 1
Pembagian Anggaran Desa Tanjung Labu



Sumber : Pemerintah Desa Tanjung Labu

Laporan realisasi APBDes yang akan disampaikan kepala desa kepada bupati setiap akhir tahun, masih terjadi keterlambatan. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh kurangnya tingkat kedisiplinan dari perangkat desa, lembaga desa, serta pelaksana kegiatan. Keterlambatan juga terjadi karena kurangnya pemahaman serta penguasaan teknologi sistem aplikasi pengelolaan keuangan. Keterlambatan juga terjadi karena belum optimalnya pengawasan dari pemerintah daerah ke desa terkait dengan pendampingan dan pembimbingan.

2. Desa Penutuk

Proses perencanaan yang dilakukan oleh Desa Penutuk dilakukan pada satu tahun sebelum anggaran itu dilaksanakan. Hal ini dapat dikatakan prosesnya sama dengan yang ada di desa lainnya di Kecamatan Lepar Pongok. Proses perencanaan dilakukan melalui musrembangdes, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhannya.

Proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Penutuk diawali dengan musrembangdes. Musrembangdes ini dilakukan di kantor kepala desa dengan tujuan untuk

merencanakan pembangunan desa untuk tahun berikutnya. Setelah dilakukannya musrembangdes, pemerintah desa akan menyusun rancangan anggaran yang telah di musyawarahkan. Kemudian rancangan tersebut nantinya akan disampaikan ke Kecamatan.

Pembagian belanja desa yang dilakukan oleh Desa Penutuk dibagi menjadi lima bidang. Pembagian tersebut terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana. Pendapatan anggaran yang dimiliki oleh desa penutuk pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.926.054.381 yang dimana dana ini nantinya akan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan desa. Kegiatan desa tersebut haruslah sesuai dengan rencana dan masuk didalam pembagian lima bidang tersebut.

Tabel 1
Rincian pendapatan Desa Penutuk Tahun 2022

Keterangan	Anggaran (Rp)
Pendapatan Transfer	1.926.054.381,00
Dana Desa	772.378.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	103.884.195,00
Alokasi Dana Desa	1.049.792.186,00
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00
Jumlah	1.926.054.381,00

Sumber : Pemerintah Desa Penutuk

3. Desa Tanjung Sangkar

Proses perencanaan anggaran desa yang dilakukan oleh Desa Tanjung Sangkar dilaksanakan pada satu tahun sebelum anggaran berjalan. Proses pelaksanaan ini sama halnya dengan desa lainnya yang dimana dilakukan melalui proses musrembangdes. Pada saat melakukan musrembangdes, desa melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhannya. Para perwakilan dari masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen akan menyampaikan aspirasi serta rincian dari setiap kegiatan

yang dibutuhkan. Setelah dilakukannya penyerapan aspirasi dari masyarakat pemerintah akan menyusun rincian anggaran sehingga menjadi RAPBDES.

Tabel 3
Rincian pendapatan Desa Tanjung Sangkar Tahun 2022

Keterangan	Anggaran (Rp)
Pendapatan Transfer	1.812.746.286,00
Dana Desa	797.615.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	127.835.155,00
Alokasi Dana Desa	1.087.608.169,00
Pendapatan Asli Desa	16.530.000,00
Hasil Usaha Desa	16.530.000,00
Pendapatan Lain-Lain	1.375.045,00
Bunga Bank	1.375.045,00
Jumlah	2.030.963.369,00

Sumber : Pemerintah Desa Tanjung Sangkar

Berdasarkan data di atas jika pendapatan yang dimiliki oleh desa Tanjung Sangkar adalah sebesar Rp. 2.030.963.369,00. Dana ini nantinya akan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan desa yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengatur terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Setelah itu dana tersebut akan dibagi lagi menjadi lima bagian.

Tabel 4
Rincian belanja Desa Tanjung Sangkar Tahun 2022

Keterangan	Anggaran (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	964.669.723,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	728.132.475,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	163.239.002,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	41.500.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak desa	234.000.000,00
Jumlah	2.131.541.200,00

Sumber : Pemerintah Desa Tanjung Sangkar

Berdasarkan data tersebut penggunaan anggaran desa berfokus pada proses penyelenggaraan dari pemerintahan. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk belanja barang dan jasa untuk pemerintahan desa seperti pembayaran penghasilan dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, BPD, pembelian atk, pemeliharaan kantor desa dan lainnya yang berhubungan dengan jalannya pemerintahan.

4. Desa Kumbung

Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kumbung diawali dengan memuat rancangan agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program dan rancangan jadwal kegiatan program dalam satu tahun. Proses musyawarah dilakukan dengan mengundang berbagai elemen masyarakat yang ada di desa. Hal ini bertujuan agar berbagai aspirasi dari masyarakat dapat diserap oleh pemerintah desa. Proses musyawarah dilakukan pada akhir tahun sebelum proses anggaran berjalan.

Seperti yang disampaikan oleh Wildavsky bahwa Proses politik menjadi pencarian kompromi, akomodasi, penyesuaian terhadap realitas pengaruh politik. Gagasan bahwa ada standar objektif yang diberikan di mana semua keputusan dapat dirujuk dan diucapkan dalam (atau tidak dalam) kepentingan publik. Musrembang ini lah yang menjadi tempat bagi setiap tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi dan kegiatan yang akan dilakukan oleh desa selama satu tahun kedepan.

Penentuan program prioritas atau kegiatan dalam tata kelola APBDes di Desa Kumbung dilakukan melalui koordinasi dari berbagai pihak. Koordinasi ini terjadi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Menurut Wildavsky dan Caiden penganggaran merupakan proses dimana berbagai aktor baik individu atau kelompok berkepentingan berbeda untuk menyuarakan keinginan mereka dan membuat sebuah keputusan. Untuk mencapai keputusan yang berbeda, mereka saling beradu argumen tentang apa yang baik dan adil. Maka dari itu dilakukannya musrembangdes agar setiap perwakilan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi serta kepentingan mereka, dan harus sesuai dengan peraturan yang mengatur terkait hal tersebut.

Pada saat menjalankan rancangan anggaran yang telah di susun pada musrembang tahun sebelumnya dapat dilakukannya perubahan. Perubahan ini dapat dilakukan sebanyak satu kali pada pertengahan tahun atau pada saat triwulan pertama berjalannya anggaran. Perubahan dapat berupa rincian dari setiap anggaran per kegiatan ataupun perubahan kegiatan yang akan dilakukan desa.

Pada saat melakukan perancangan APBDES telah melibatkan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di desa sudah lebih baik. Selain itu, Sasaran atau hasil yang akan dicapai dan ditetapkan dalam perencanaan APBDes.

Tabel 5
Rincian pendapatan Desa Kumbung Tahun 2022

Keterangan	Anggaran (Rp)
Pendapatan Transfer	1.828.658.938,00
Dana Desa	748.424.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	120.342.844,00
Alokasi Dana Desa	959.892.094,00
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00
Jumlah	1.828.658.938,00

Sumber : Pemerintah Desa Kumbung

Anggaran yang didapatkan oleh pemerintah desa akan digunakan untuk menjalankan program program yang telah di musyawarahkan bersama masyarakat. Besaran anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Kumbung adalah sebesar Rp.1.828.658.938,00. Anggaran ini nantinya akan di bagikan untuk belanja barang atau jasa bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

B. Corak APBDES di wilayah Kepulauan

Kecamatan Lepar Pongok merupakan salah satu kawasan memiliki corak atau berbasis kepulauan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi geografis dari

Kecamatan Lepar Pongok yang terletak di luar Pulau Bangka menjadikannya berbeda dengan kecamatan lainnya. Kondisi jarak dan waktu untuk menempuh perjalanan ke Lepar Pongok yang menjadi salah satu alasan mengapa Kecamatan Lepar Pongok berbeda dari desa lainnya.

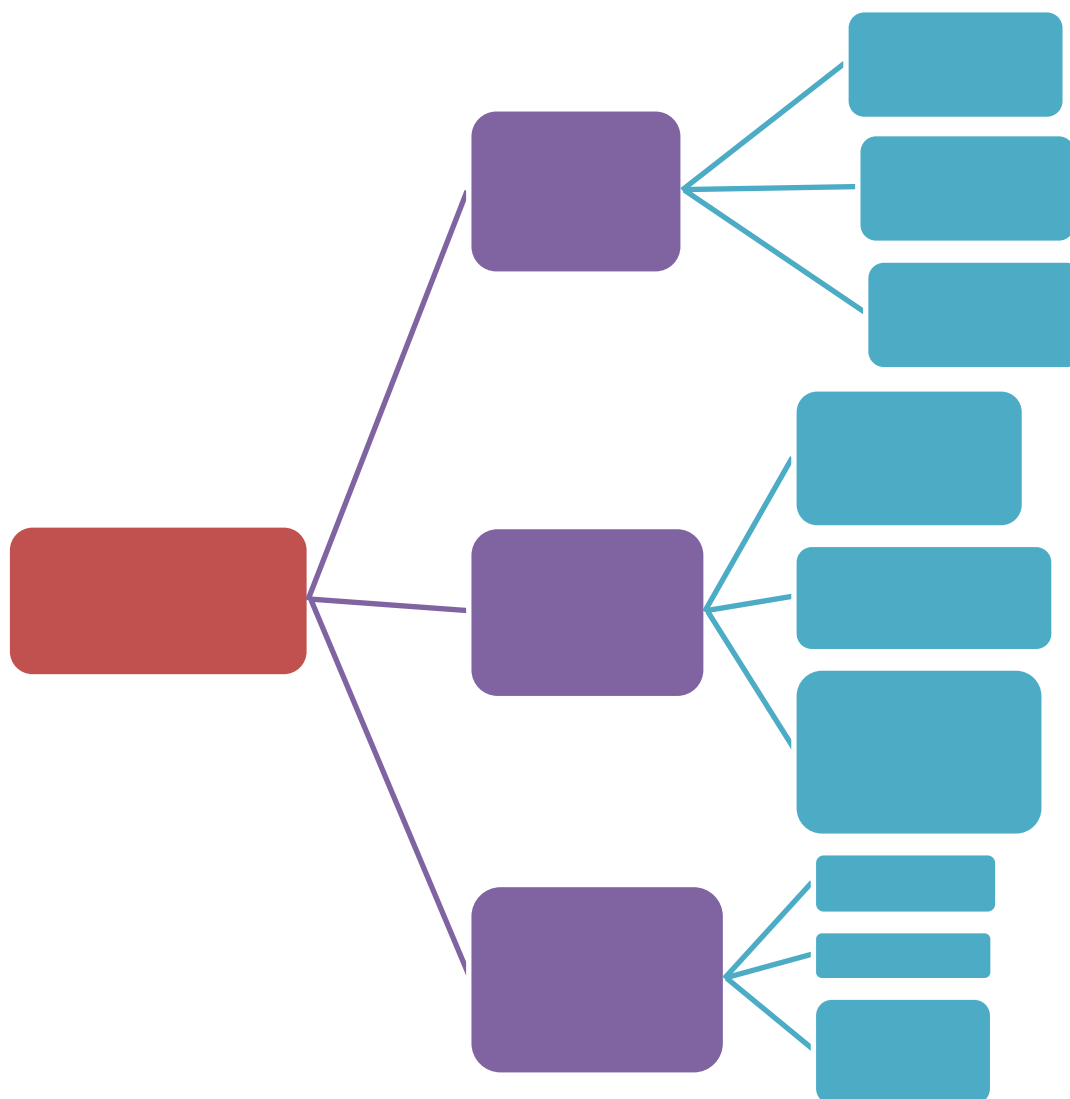
Corak utama di daerah kepulauan adalah pada fokus pembangunan dan penggunaan anggaran desa untuk perbuatan dermaga, pengembangan pariwisata berbasis *blue tourism*, pengembangan usaha hasil laut dan pembangunan lainnya yang berhubungan dengan wilayah pesisir dan laut. Sedangkan, fokus pembangunan desa di daerah daratan seperti pembangunan lumbung padi, sanitasi, pembangunan embung pertanian, irigasi. Pembangunan dermaga sangat diperlukan di kawasan kepulauan karena digunakan sebagai penghubung untuk penyebrangan bagi nelayan maupun masyarakat.

Fokus pengembangan desa yang menjadi corak dari desa di Kecamatan Lepar Pongok adalah pada sektor pengembangan sektor laut seperti pengembangan destinasi wisata, perikanan, dan pengelolaan hasil laut. pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah berfokus pada pengelolaan sumber daya laut. Selain, memanfaatkan potensi laut desa juga mengembangkan kegiatan pertanian atau perkebunan. Pertanian dan perkebunan yang di kelola pun merupakan tanaman yang cocok di wilayah pesisir adalah seperti perkebunan lada, karet, kelapa sawit, karet.

Pengembangan pada potensi hasil laut ini di gunakan untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat maupun bagi desa itu sendiri. Seperti penjualan hasil dari perkebunan yang dapat meningkatkan pendapatan desa. Sektor pariwisata pun memberikan dampak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun desa dengan adanya wisatawan yang pergi berkunjung ke kawasan wisata tersebut.

Ciri khas atau corak selanjutnya yang dimiliki oleh Kecamatan Lepar Pongok adalah dengan mata pencaharian dari masyarakat desa itu sendiri. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Lepar Pongok bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka memilih menjadi nelayan dikarenakan kekayaan akan biota laut yang dimiliki.

Bagan 2. Corak APBDES Berbasis Kepulauan



Berdasarkan bagan di atas jika terdapat tiga corak APBDES wilayah kepulauan yaitu fokus pembangunan yang dirancang oleh desa setiap tahunnya yang dimana pembangunan lebih berfokus pada pengembangan kawasan pesisir dan laut. Corak selanjutnya yang menjadi ciri dari APBDES kepulauan adalah potensi desa, potensi yang dimiliki oleh desa di kepulauan terkait dengan potensi pariwisata kawasan pantai dan laut, hasil perkebunan yang cocok di daerah pesisir seperti tanaman kelapa sawit, lada dan karet, maupun melakukan budidaya ikan ataupun hasil laut. Corak terakhir yang dapat dilihat dari APBDES kawasan kepulauan dapat dilihat dari mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat sekitar, masyarakat di kawasan kepulauan bekerja dengan memanfaatkan kawasan pesisir dan laut seperti menjadi nelayan, pembudidaya hasil laut, maupun menjadi petani.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan jika dalam proses penganggaran di Kecamatan Lepar Pongok melalui tiga tahapan, dimana setiap tahapannya memiliki kendala masing masing. Hal ini dikarenakan Wildavsky melihat politik sebagai konflik, sebagai perjuangan antar kelompok mengejar tujuan dan sasaran yang kontras dan bertentangan. Pelaksanaan APBDES di Kecamatan Lepar Pongok juga dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal ini, di karenakan SDM yang ada tidak sepenuhnya menguasai teknologi atau sistem pengelolaan APBDES seperti siskuedes. Selain itu, tingkat kedisiplinan dari perangkat desa juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih terjadinya keterlambatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengumpulkan laporan pertanggung jawaban.

Corak dari tata kelola APBDES di kawasan kepulauan dicirikan dengan pembangunan yang ada di desa dan mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Corak utama dari kawasan kepulauan adalah berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut. Pembangunan yang berfokus dalam membantu pengembangan hasil laut yang ada.

Saran

Berdasarkan dari hasil pengkajian hasil penelitian di lapangan maka peneliti bermaksud, memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat bagi lembaga atau peneliti selanjutnya. Terkait dengan proses tata kelola anggaran diperlukannya peran dari berbagai pihak khususnya masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai pengawas jalannya tata kelola APBDES. Pemerintah desa juga harus meningkatkan pemahaman serta pengetahuan terkait dengan teknologi sistem keuangan. Kedisiplinan dari perangkat desa juga sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan performa dari jalannya pemerintahan desa. Perbaikan secara berkala dengan terus mengikuti peraturan perundang undangan, agar tata kelola anggaran dapat berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. (2018). *Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arifin, N. Z., Shihab, Q., & Fadhillah, S. (2021). KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BIDANG KEPEMUDAAN DALAM TATA KELOLA APBDES. *Jurnal riview politik*.
- BPS. (2021). *Kecamatan Lepar Pongok dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Bangka Selatan .
- Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi pengelolaan keuangan desa sumberadi dan tlogadi di kabupaten sleman: evaluasi praktik transparansi dan akuntabilitas. *JATI (jurnal akuntansi terapan indonesia)*, 64-69.
- Hakim, m. (2012). politik anggaran keuangan desa (studi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) 2011 desa pakijangan, kecamatan wonorejo, kabupaten pasuruan). *skripsi. universitas muhammadiyah malang*.
- Hakim, m. (2012). politik anggaran keuangan desa (studi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) 2011 desa pakijangan, kecamatan wonorejo, kabupaten pasuruan). *skripsi. universitas muhammadiyah malang*.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*. Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- Horison, L. (2009). *Metodelogi Penelitian Politik* . Jakarta: Prenada Media Group.
- Howlett, M. (1995). *Studying Public Policy : Policy Circles and Policy Subsiter*. *oxfor university press*.
- ibrahim. (2015). *metoelogi penelitian kualitatif*. bandung : alfabeta.
- Imelda. (2022). *Tahun 2022, Babel Peroleh Dana Desa Sebesar 274,4 Miliar*. Dipetik 2023, dari Babel.Prov: https://dev3.babelprov.go.id/berita_detil/tahun-2022-babel-peroleh-dana-desa-sebesar-2744-miliar
- mardiasmo. (2002). *otonomi dan manajemen keuangan daerah*. penerbit andi : yogyakarta.
- martono, n. (2015). *metode penelitian kuantitatif*. jakarta: pt. rajagrafindo persada.
- Mulyadi. (1993). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: sekolah tinggi ilmu ekonomi YKPN.
- Pratiwi, R. N. (2019). Politisasi Anggaran Sektor Publik. *Fisip UB*.
- rivan, a., & maksum, i. r. (2019). penerapan sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. *jurnal administrasi publik* .
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial dalam pengelolaan alokasi dana desa (add) di kantor desa perangkat selatan kecamatan marangkayu kabupaten kutai kartanegara. *ejournal administrasi negara*, 120-129.
- SekdaBasel. (t.thn.). *Profil Bangka Selatan*. Diambil kembali dari jdih.bangkaseltankab.go.id.
- soekanto, s. (2017). *sosiologi suatu pengantar*. jakarta: pt raja grafindo persada.
- Sucahyo, H. (2019). Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur. *Karta Raharja*, 1(1), 33-46.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Bina Mulia Hukum*, 83-93.
- Sugiyono. (2013). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d*. bandung: alfabeta.
- sukmadinata, & syaodih. (2011). *metode penelitian pendidikan*. bandung: pt.remaja rosdakarya.

- Syachbrani, W., & Yahya, M. (2018). realisasi perencanaan dan pelaksanaan tata kelola keuangan pemerintah desa (studi pada desa munte, luwu utara, sulawesi selatan). *bongaya journal ogg research in management*.
- Syafii, A., & Kismartini, D. (2019). DESA DALAM MENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) UNTUK PEMBANGUNAN. *Universitas Diponegoro*.
- Syarifuddin. (2009). Konstruksi anggaran : aaksentuasi drama politi dan kekuasaan (studi kasus kabupaten jembrana bali). *ekuitas*.
- tahir, m., anwar, a., & dinakhir, s. (2019). analisis pengelolaan keuangan dana desa di desa bululeo kecamatan turatea kabupaten jenepono. *universitas negeri makassar*.
- Wildavsky, A., & Caiden, N. (2004). *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Yogyakarta: Mata Pena.